



### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan pertanggungjawaban sepenuhnya berada di pundak saya.

Bandar Lampung, 15 Juni 2021



**CHERLIANA HENDRA NH**

**NPM. 1712120045**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Tugas Akhir

**: PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN  
PERKAPITA TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus  
Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

**: CHERLIANA HENDRA NURHARYANTO**

No. Pokok Mahasiswa

**: 1712120045**

Program Studi

**: S1 Akuntansi**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang  
Tugas Penutup Studi guna memperoleh gelar **SARJANA EKONOMI** pada  
Program Studi **S1 Akuntansi IIB DARMAJAYA**

Bandar Lampung,

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

**Toni Nurhadianto, S.E., M.Sc**

NIK. 14900319

Menyetujui,

Ketua Jurusan Akuntansi

**Toni Nurhadianto, S.E., M.Sc**

NIK. 14900319

## HALAMAN PENGESAHAN

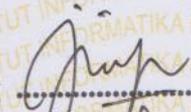
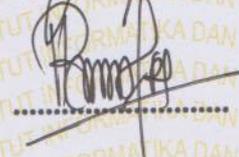
Pada tanggal 14 Juni 2021 telah diselenggarakan Sidang SKRIPSI dengan judul:  
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN  
PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA** Untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
**SARJANA EKONOMI**, bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **CHERLIANA HENDRA NURHARYANTO**

No. Pokok Mahasiswa : **1712120045**

Program Studi : **S1 AKUNTANSI**

Dan telah dinyatakan **LULUS** oleh Dewan Penguji yang terdiri dari :

<u>Nama</u>	<u>Status</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. <b>Indra Chaniago, S.E., M.Ak</b>	- Ketua Sidang	
2. <b>Rieka Ramadhaniyah, S.E, M.Ec. Dev</b>	- Anggota	

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya

  
**Dr. Fauran I Santi Singagerda, S.E., M.Sc**

**NIK. 30040419**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juni 2021

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, KINERJA KEUANGAN DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP PENINGKATAN INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA  
(Studi Kasus Provinsi Lampung)**

**OLEH  
CHERLIANA HENDRA NURHARYANTO  
1712120045**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan  
Bisnis Darmajaya  
Jl. Z.A. Pagar Alam No.93, Gedong Meneng, Bandar Lampung 35142–  
INDONESIA Telp. (0721)787214 Fax. (0721) 700261  
*E-mail:* [cherlianahendra@gmail.com](mailto:cherlianahendra@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian daerah, kinerja keuangan dan belanja modal terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung periode 2018-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil pengujian variable menyatakan bahwa Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemandirian Daerah, Derajat Desentralisasi, Belanja Modal

Jurnal Akuntansi : Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Periode 2018-2020)

---

IIB  
DARMAJAYA  
2021

## PENDAHULUAN

Konsep Pembangunan Manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang ditetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1996 untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai penghidupan yang layak.

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Pentingnya pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan dalam pembangunan sebuah wilayah. Menurut UNDP pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of the people*) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut ( BPS, 2018 ).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Manfaat IPM menjadi sangat penting karena bernilai strategis dan dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penentuan dana perimbangan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), dimana salah satu alokatornya adalah IPM.

Dari kutipan News - Tirta Citradi, CNBC Indonesia.” Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI No 107 dari 189 Negara!”. Diakses 12 Juli 2021. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima. IPM Indonesia kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Untuk semua aspek yang dievaluasi Indonesia jelas tertinggal jauh dari Singapura yang menyandang predikat IPM sangat tinggi dan berada di peringkat 11 dunia. Jika dibandingkan dengan Brunei pun masih tertinggal. Bahkan untuk semua aspek Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia. Namun apabila dibandingkan dengan Thailand, Indonesia masih lebih unggul dalam hal rata-rata lama sekolah.

Penurunan IPM Indonesia di skala internasional, dipengaruhi oleh perkembangan IPM di dalam negeri. Perkembangan IPM di Indonesia baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dipublikasikan oleh BPS setiap tahunnya. Pada

tahun 2015, BPS melakukan perubahan metodologi perhitungan IPM. Perubahannya adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah pada metode baru. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada metode lama diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita pada metode baru. Penghitungan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik pada metode baru. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

Menurut Astri dkk. (2013), peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan pelayanan publik yang menjadi tugas pokok pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan membiayai pengeluaran untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya melalui penerimaan daerahnya, sehingga pengeluaran publik suatu daerah pada era otonomi daerah bergantung kepada penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain. Pengeluaran sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan pada suatu daerah. Otonomi daerah tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya terkait pembangunan, tetapi juga memberikan wewenang terkait dengan keuangan pemerintah

daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengolah keuangan daerahnya sehingga terkelola dengan optimal yang berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah (Dewi, 2014).

Selanjutnya kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan di daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:231). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dalam organisasi pemerintahan, terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan APBD yang merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintahan.

Belanja modal secara umum dialokasikan untuk sarana dan prasarana publik, dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk

fasilitas publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung aspek pembangunan manusia di wilayahnya, seperti gedung/bangunan sekolah yang layak dan ketersediaan alat peraga atau laboratorium di setiap sekolah yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar-mengajar, gedung/bangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau puskesmas yang nyaman dan ketersediaan alat kesehatan (alkes) yang memadai di setiap FKTP, serta infrastruktur jalan/jembatan yang memperlancar akses transportasi dan aktifitas ekonomi suatu wilayah untuk meningkatkan paritas daya beli masyarakat baik komoditas makanan dan non makanan.

Dari latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruh kemandirian daerah, kinerja keuangan dengan proksi derajat desentralisasi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Gita (2020), Prakoso (2020), Anton (2017), Andin (2017) dan Kiki (2016). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian serta penambahan variabel, peneliti menggunakan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 - 2020 serta penambahan variabel kemandirian daerah dan belanja modal. Maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal**

**Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2018-2020”**.

#### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020 ?
- 2) Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020 ?
- 3) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020 ?

#### TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di utarakan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020
- 2) Untuk membuktikan secara

empiris pengaruh Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020

- 3) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020

## LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak..Teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif adalah *principal* (Halim, 2010).

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat, maka hubungan pemerintah pusat adalah sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah sebagai agen yang dapat dilihat dari tindakan pendelegasian dana perimbangan kepada daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban dari adanya pendelegasian wewenang tersebut dan dana tersebut digunakan

untuk membiayai seluruh belanja pemerintah daerah.

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut BPS (2008: 9), IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Sebelumnya IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu: angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Namun kemudian BPS mengubah perhitungan IPM menggunakan metode baru yang dibentuk berdasarkan empat indikator yang disempurnakan yaitu: angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan kemampuan daya beli melalui pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS, 2015).

### Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari

eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007).

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Menurut Halim (2007), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah.

### **Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Derajat desentralisasi dihitung

berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Mengukur derajat otonomi fiskal berdasarkan persentasi perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah (Munir dkk., 2004).

### **Belanja Modal**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 2, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2, Permendagri nomor 59 tahun 2007 ditentukan bahwa nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.

### **Bangunan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Penelitian Prakoso (2020) Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar keleluasaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti ketersediaan bangunan/gedung sekolah yang layak, peralatan kesehatan secara lengkap yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan harga komoditas baik makanan atau non makanan. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya. Dengan kata lain rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah. Semakin tinggi

rasio tersebut maka pemerintah daerah semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik sehingga peningkatan IPM dapat tercapai (Mahmudi, 2007).

**H1: Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.**

#### **Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan proksi rasio derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010:142). Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. Semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin leluasa pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat, yaitu peningkatan indeks harapan hidup, pendidikan, dan paritas daya beli yang ketiganya merupakan dasar pengukuran IPM. Menurut Penelitian Gita (2020) Semakin tinggi pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakintinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam pembangunan layanan publik seperti peningkatan indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang ketiganya

merupakan dasar pengukuran Indeks Pembangunan manusia.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Anggraini (2015) meneliti pengaruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap IPM. Hasil penelitiannya antara lain menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM.

**H2: Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.**

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Penelitian Kiki (2016) Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, total penerimaan belanja modal dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi umum seperti jalan, dan jembatan, peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan berbagai bidang karena tidak semua belanja modal berefek pada publik. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Zayendra, (2016) mengatakan belanja modal memberi dampak positif pada indeks pembangunan manusia. Berlandaskan dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H3: Belanja modal berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah:

- Data pendapatan daerah berupa PAD, dana perimbangan/transfer, pinjaman daerah, data belanja modal, LRA (audited) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018-2020 kabupaten/kota yang ada di provinsi Lampung, yang diperoleh dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK.

- Data IPM yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS).

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah Triangulasi (Sugiyono, 2013). Data yang dikumpulkan melalui triangulasi yaitu dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dari Biro keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Provinsi Jawa dan website Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/>).

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

### Sampel

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method (Sugiono, 2012). Data yang digunakan adalah laporan realisasi pendapatan daerah, laporan statistik keuangan daerah Lampung sebagai alat ukur kemandirian daerah, kinerja

keuangan dengan rasio derajat desentralisasi dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2018-2020.

### Variabel Penelitian

#### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### 2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini variable independen yang digunakan adalah kemandirian daerah, kinerja keuangan dengan proxi derajat desentralisasi dan belanja modal

### HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung	13
2	Kota yang ada di Provinsi Lampung	2
3	Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan	15
4	Jumlah Observasi (3 tahun x 15)	45
<b>Jumlah sampel</b>		45

## Uji Normalitas

Tabel 4.3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,6297468
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,147
	Absolute Negative	,086
		-,147
Kolmogorov-Smirnov Z		,989
Asymp. Sig. (2-tailed)		,282

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* pada tabel 4.3 menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* yaitu 0,282. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

## Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	63,280	,894			
KEMANDIRIAN DAERAH	-52,537	11,960	-1,778	,026	38,980
KINERJA KEUANGAN	144,585	21,633	2,617	,027	36,478
BELANJA MODAL	-1,035E-009	,000	-,027	,668	1,498

a. Dependent Variable: IPM

Pada Tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa variabel independen secara keseluruhan memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat multikolinearitas.

## Uji Autokorelasi

Tabel 4.5

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,910 <sup>a</sup>	,828	,815	1,68832	2,410

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, KINERJA KEUANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH

b. Dependent Variable: IPM

Dari hasil uji *Durbin Watson* pada tabel 4.5, diketahui nilai *Durbin Watson* (DW) adalah sebesar 2,410 dengan batas atas (DU) 1,7574. Nilai DW lebih besar dari batas atas (DU) 1,7574 dan kurang dari 4 -1,7574 = 2,2525 (4 -DU), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,528	,485		1,089	,283

KEMAN DIRIAN DAERA H KINERJ A KEUAN GAN BELANJ A MODAL	-8,175	6,494	-1,182	-1,259	,215
	15,425	11,746	1,193	1,313	,196
	2,091E -009	,000	,235	1,278	,209

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variabel kemandirian daerah, efektivitas pad dan belanja modal memiliki nilai signifikan  $> 0,05$  (0,215; 0,196; 0,209  $> 0,05$ ). Artinya 3 variabel memenuhi syarat terhindar dari heteroskedatisitas.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 4.7

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	63,280	,894		70,799	,000	
KEMAN DIRIAN DAERA H KINERJ A KEUAN GAN	-52,537	11,960	-1,778	-4,393	,000	
	144,585	21,633	2,617	6,684	,000	

BELAN JA MODAL	-1,035E- 009	,000	-.027	-.343	,733
----------------------	-----------------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: IPM

Dari tabel diatas diketahui hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,827 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen yaitu sebesar 82,8% dan sisanya sebesar 17,4% dijelaskan oleh variabel lain.

### Uji F-test

Tabel 4.8

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regres sion	561,568	3	187,189	65,671	,000 <sup>b</sup>
Residu al	116,867	41	2,850		
Total	678,435	44			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, KINERJA KEUANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH

Dari hasil uji ANOVA atau *F test*, didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,000 atau  $< 0,05$  sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena semua variabel independen (Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan, dan Belanja Modal) berpengaruh terhadap variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## Uji t-test

**Tabel 4.9**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	63,280	,894			70,799	,000
Kemandirian Daerah	-52,537	11,960	-1,778		4,393	,000
Kinerja Keuangan	144,585	21,633	2,617		6,684	,000
Belanja Modal	-1,035E-009	,000	-,027		-,343	,733

a. Dependent Variable: IPM

Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan table 4.10 hasil pengujian menunjukkan variable Kemandirian Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ( $p < 0,05$ ). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kata lain H1 diterima.
2. Berdasarkan table 4.9 hasil pengujian menunjukkan Derajat Desentralisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ( $p < 0,05$ ). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Derajat

Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kata lain H2 diterima.

3. Berdasarkan table 4.9 hasil pengujian menunjukkan variable Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,733 yang lebih besar dari 0,05 ( $p > 0,05$ ). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kata lain H3 ditolak.

### **Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada hasil analisis data yang dilakukan variabel efektivitas pad berpengaruh signifikan pada IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintah dapat meningkatkan PAD dan itu akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah tersebut di harapkan mampu untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007). Rasio

kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD

Seperti penelitian Hanif (2018) yang menyatakan kemandirian daerah berpengaruh pada IPM. Tidak hanya itu dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik lebih demokratis. Jika daerah tersebut tidak mampu untuk menerapkan desentralisasi fiskal yaitu berupa pelimpahan wewenang dari pusat maka daerah tersebut akan tertinggal dan menyebabkan kemunduran dalam pembangunan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah jika dalam masing-masing daerah dapat mandiri dalam mengelola daerahnya maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

#### **Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada hasil analisis data yang dilakukan variabel Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan pada IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya. Dengan adanya bantuan pemerintah pusat pemerintah Provinsi Lampung memiliki sumber daya pendanaan selain PAD yang berasal dari total pendapatan daerah yang semakin tinggi, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Layanan publik yang baik dapat meningkatkan IPM.

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Prakoso (2017), yang menyatakan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, namun sejalan dengan penelitian Sari dan Supadmi (2016) yang menyatakan Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada hasil analisis data yang dilakukan variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan pada IPM. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila

teralisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pratowo (2012) dan Priambodo (2015). Peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/ prasarana (misalnya pembangunan jalan, bendungan, dan lainnya), penyediaan layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai pihak. Pembangunan infrastruktur akan mempekerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak *multiple effect*

ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2020. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan dengan proksi Derajat Desentralisasi dan Belanja Modal yang diuji pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini mengambil sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebanyak 15 sampel sebanyak 3 tahun berturut – turut sehingga sampel yang didapat sebesar 45 sampel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan Purposive sampling dan data diolah menggunakan program SPSS 20.0.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian variabel Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan dengan proksi Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### Keterbatasan Penelitian

Berikut ini beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya :

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini belum mengkaji variabel lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian, dimana pada penelitian ini hanya menggunakan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang rentang penelitian sehingga kecenderungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam jangka panjang dapat lebih terlihat.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti tingkat pengangguran, dana alokasi umum dan tingkat pendidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, T. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. Dissertasi.

Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Astri, Meylina. Nikensari, S.I. dan Kuncara, Harya. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis* Vol 1, No.1.UNJ. Jakarta

Badan pusat statistik (BPS), 2021. Indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan belanja modal. <http://www.bps.go.id> diakses 11 Juli 2021.

Batafor, G. G. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi NTT. Tesis. Bali. Universitas Udayana Denpasar.

Bati, 2009. Pengaruh Belanja Modal dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Utara). Universitas Sumatra Utara, Medan.

Cahyono,Hendry. 2015. Pengaruh Nilai Tukar Petani Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya.

Citradi, Tirta. CNBC Indonesia. 2020. *Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI*

- No 107 dari 189 Negara!*. Diakses 12 Juli 2021. Dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558/duh-indeks-pembangunan-manusia-ri-no-107-dari-189-negara/2>
- Darwanto dan Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal studi Kasus Kabupaten atau Kota se-Jawa Bali tahun 2004-2005.
- Denni, S.M. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal* ED AJ. 1(1).
- Dewi, P.A.K dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 4, No. 1.
- Eka Siwi Hidayati, 2012. Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Lampung.
- Fitriani, Kiki. 2016. Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah di provinsi lampung periode 2013-2015. Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Ghozali, Imam., 2013. Uji Asumsi Klasik. Semarang : Badan UNDIP
- Ghozali, Imam., 2010. Uji Stastik T. Semarang: Badan UNDIP
- Ghozali, Imam., 2012. Analisis Dterminasi. Semarang : Badan UNDIP
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan syukriy Abdullah (2010). *Agency Theory Pemerintah Daerah*.
- Helfert, E. A. 1982. *Techniques of Financial Analysis* 5th Edition. Homewood, IL: Irwin
- Hobrouw, Yustina Asnad, Suaryana I Gusti Ngurah Agung, dan Putri I G.A.M Asri Dwija (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. Universitas Udayana.

- Ida Ayu Cendara, Ni Luh Supadmi, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali.
- Irfan Hanif, Muhammad. 2018. Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode (2013-2017)).
- Kahang Merang, Saleh Muhammad, Suharto Rachmad Budi. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur. Universitas Mulawarman
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Kapasitas Pembebanan Belanja Modal dan Pengeluaran Belanja Modal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Nilai Asset Belanja Modal.
- Peraturan Peresiden Nomor 71 tahun 2010 Tentang Belanja Modal Untuk Memperoleh asset Pemerintah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 Tentang Penyelenggaraan Akuntansi Asset Tetap.
- Prakoso, I. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Se-provinsi Lampung. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Pratowo, Nur Isa. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia.
- Priambodo, Anugrah. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Universitas Brawijaya Malang.
- Putu Gede, I Gusti Ketut Agung , 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali.
- Rai, I. G. A. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Ida Ayu Candra Yunita & Supadmi, Ni Luh. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3.
- Sari, Febri Nur Gita. 2020. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Sarkoro, Hastu & Zulfikar.2016. Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia.
- Setyowati dan Yohanankus Suparwati, 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.
- Sidiq Ariyanto, Farhan. 2018. Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar petani terhadap indeks pembangunan manusia dipulau sumatera tahun 2011-2016. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono,2013. Metode Penelitian. Bandung : Alfabeta Jenis Penelitian, Pengumpulan data dan Sumber.
- Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, Vol.1 (2):109-124.
- Suryaningsih, et. al. 2015. Dampak Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 40 (8):537-554. ISSN : 2337-3067.
- Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan.

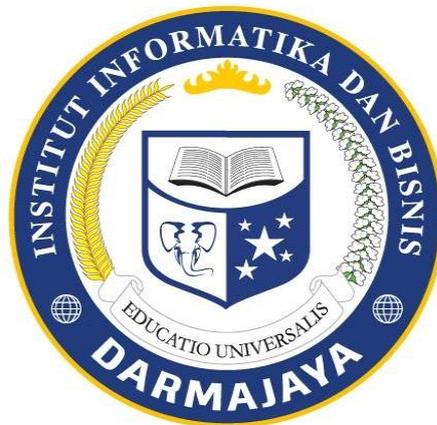
- Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.
- Trianto, Anton. 2017. Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang. 2017.
- Tria Desi Putri, Toto Gunarto, Saimut, 2014, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintahan Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2013
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang kategori Belanja Modal
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Objek dan Retribusi Pajak Daerah.
- UNDP, 2004 Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia. <http://www.undp.or.id>, diakses tanggal 25 november 2015 Yovita, Farah Marta.
2011. Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja.
- UNDP. 1995. Human Development Report 1995. Oxford University Press. New York
- Zayendra, 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Daerah fungsi pendidikan, kesehatan dan Belanja Modal sebagai variabel pemedediasi.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN  
PENDAPATAN PERKAPITA PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA**

**(Studi Kasus Provinsi Lampung)**

**(SKRIPSI)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)



**Oleh :**

**CHERLIANA HENDRA NURHARYANTO**

**NPM. 1712120045**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA DARMAJAYA  
BANDAR LAMPUNG  
2020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

2.1 Teori Keagenan .....	11
2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	12
2.3 Kemandirian Keuangan Daerah .....	14
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah .....	14

2.4 Kinerja Keuangan.....	16
2.4.1 Derajat Desentralisasi.....	17
2.5 Belanja Modal .....	19
2.6 Penelitian Terdahulu .....	21
2.7 Kerangka Penelitian .....	24
2.8 Bangunan Hipotesis .....	24
2.8.1 Pengaruh Kemandirian Daerah .....	24
2.8.2 Pengaruh Kinerja Keuangan .....	25
2.7.3 Pengaruh Belanja Modal.....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Sumber Data.....	27
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	27
3.3 Populasi Dan sampel Penelitian .....	28
3.3.1 Populasi Penelitian .....	28
3.3.2 Sampel Penelitian.....	28
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	28
3.4.1. Variabel Dependen.....	28
3.4.2. Variabel Independen .....	29
3.4.2.1. Kemandirian Daerah .....	29
3.4.2.2. Kinerja Keuangan.....	30
3.4.2.2.1. Rasio Desentralisasi .....	30
3.4.2.3. Belanja Modal .....	30
3.5 Metode Analisis Data.....	31
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	31
3.5.2 Kuantitatif .....	31
3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik .....	31
3.5.2.1.1. Uji Normalitas.....	31
3.5.2.1.2. Uji Multikolinieritas.....	32
3.5.2.1.3. Uji Autokorelasi .....	32

3.5.2.1.4. Uji Heteroskedastisitas.....	33
3.6. Uji Regresi Linier Berganda .....	33
3.7. Pengujian Hipotesis.....	34
3.7.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	34
3.7.2. Uji F- Test .....	34
3.7.3. Uji T - Test.....	35

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	36
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	36
4.2 Hasil Analisis Data.....	37
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	37
4.3. Uji Asumsi Klasik.....	38
4.3.1. Uji Normalitas Data .....	39
4.3.2. Uji Multikolinearitas .....	40
4.3.3. Uji Autokorelasi .....	41
4.3.4. Uji Heterokedatisitas .....	41
4.3.5. Uji Regresi Linier Berganda.....	42
4.4. Hasil Pengujian Hipotesis .....	43
4.4.1. Uji Koefisien Determinasi $R^2$ .....	43
4.4.2. Uji Statistik F/Kelayakan .....	44
4.4.3. Uji Statistik t.....	45
4.5. Pembahasan Hasil Penelitian.....	47
4.5.1. Pengaruh Kemandirian Daerah .....	47
4.5.2. Pengaruh Derajat Desentralisasi.....	48
4.5.3. Pengaruh Belanja Modal .....	48

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan .....	50
5.2 Keterbatasan.....	51
5.3 Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Daftar Nilai IPM Provinsi di Lampung.....	3
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian terdahulu.....	21
<b>Tabel 3.1</b> Kriteria Indeks Pembangunan Manusia .....	29
<b>Tabel 4.1</b> Prosedur dan Hasil Pemilihan Sampel .....	36
<b>Tabel 4.2</b> Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	37
<b>Tabel 4.3</b> Hasil Uji Normalitas.....	39
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Uji Multikolinearitas.....	40
<b>Tabel 4.5</b> Hasil Uji Autokorelasi.....	41
<b>Tabel 4.6</b> Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	42
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	42
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	44
<b>Tabel 4.9</b> Hasil Uji F .....	45
<b>Tabel 4.10</b> Hasil Uji T .....	46

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.7.</b> Kerangka Pemikiran .....	27
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Data Sampel Penelitian
- Lampiran 2 Tabulasi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	23
------------	--------------------------	----





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.LATAR BELAKANG MASALAH**

Konsep Pembangunan Manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks yang ditetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1996 untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai penghidupan yang layak.

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Pentingnya pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan dalam pembangunan sebuah wilayah. Menurut UNDP pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of the people*) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut ( BPS, 2018 ).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Manfaat IPM menjadi sangat penting karena bernilai strategis dan dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah

adalah penentuan dana perimbangan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), dimana salah satu alokatornya adalah IPM.

Selain itu, IPM juga digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia. Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilihat dalam jangka pendek.

Dari kutipan News - Tirta Citradi, CNBC Indonesia.” Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI No 107 dari 189 Negara!”. Diakses 12 Juli 2021. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima. IPM Indonesia kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Untuk semua aspek yang dievaluasi Indonesia jelas tertinggal jauh dari Singapura yang menyandang predikat IPM sangat tinggi dan berada di peringkat 11 dunia. Jika dibandingkan dengan Brunei pun masih tertinggal. Bahkan untuk semua aspek Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia. Namun apabila dibandingkan dengan Thailand, Indonesia masih lebih unggul dalam hal rata-rata lama sekolah.

Penurunan IPM Indonesia di skala internasional, dipengaruhi oleh perkembangan IPM di dalam negeri. Perkembangan IPM di Indonesia baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dipublikasikan oleh BPS setiap tahunnya. Pada tahun 2015, BPS melakukan perubahan metodologi perhitungan IPM. Perubahannya adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah pada metode baru. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada metode lama diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita pada metode baru. Penghitungan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik pada metode baru. Dengan memasukkan

rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

Pembangunan nasional tidak dapat dilakukan secara menyeluruh jika pengelolaan kewenangannya hanya dari pemerintah pusat saja, mengingat luasnya Indonesia. Maka pembangunan di daerah juga diperlukan khususnya pembangunan manusia, sehingga kesenjangan antara daerah dan pusat dapat diatasi.

Tabel 1.1

Daftar Nilai IPM Provinsi di Lampung

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	2020	2019	2018
Lampung Barat	67.80	67.50	66.74
Tanggamus	66.42	66.37	65.67
Lampung Selatan	68.36	68.22	67.68
Lampung Timur	69.37	69.34	69.04
Lampung Tengah	70.16	70.04	69.73
Lampung Utara	67.67	67.63	67.17
Way Kanan	67.44	67.19	66.63
Tulangbawang	68.52	68.23	67.70
Pesawaran	65.79	65.75	64.97
Pringsewu	70.30	69.97	69.42
Mesuji	63.63	63.52	62.88
Tulang Bawang Barat	65.97	65.93	65.30
Pesisir Barat	63.91	63.79	62.96
Kota Bandar Lampung	77.44	77.33	76.63
Kota Metro	77.19	76.77	76.22

Sumber : BPS 2021.

Berdasarkan data di atas, presentasi nilai IPM di Provinsi Lampung mengalami fluktuatif setiap tahunnya baik itu naik atau turun. Namun jika dilihat secara garis besar berdasarkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung mengalami perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasar data Berita Resmi Statistik dari BPS tentang Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Tahun 2020 tercatat dari tahun 2018 sebesar 69,02 tahun 2019 sebesar 69,57 dan tahun 2020 sebesar 69,69. Melambatnya pertumbuhan ini dikarenakan turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari Rp10.114 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi Rp9.982 juta rupiah pada tahun 2020.

Untuk dapat menjalankan misi pembangunan nasional di masing-masing daerah, diperlukan sumber dana yang cukup. Pada UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 telah dijelaskan beberapa sumber dana yang dapat digunakan dalam segala aktivitas kegiatan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi. Desentralisasi Fiskal membuat pemerintah daerah harus pintar mengalokasikan dana dari APBD tidak hanya pada sektor utama, namun juga pada sektor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal.

Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007). Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber utama pendanaan dalam membiayai belanja daerah. PAD diperoleh dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri seperti misalnya pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Diharapkan dengan tingginya PAD sebagai sumber pendanaan mandiri dapat digunakan untuk alokasi pembiayaan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat seperti infrastruktur dan kesehatan, yang merupakan tujuan dari pembangunan manusia, sehingga indeks pembangunan manusia juga bisa meningkat pada daerah tersebut (Sarkoro dan Zulfikar, 2016).

Menurut Astri dkk. (2013), peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan pelayanan publik yang menjadi tugas pokok pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan membiayai pengeluaran untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya melalui penerimaan daerahnya, sehingga pengeluaran publik suatu daerah pada era otonomi daerah bergantung kepada penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain. Pengeluaran sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan pada suatu daerah. Otonomi daerah tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya terkait pembangunan, tetapi juga memberikan wewenang terkait dengan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengolah keuangan daerahnya sehingga terkelola dengan optimal yang berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah (Dewi, 2014).

Selanjutnya kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan di daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:231). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dalam organisasi pemerintahan, terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan APBD yang merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintahan.

Kajian empiris mengenai kinerja keuangan daerah dan IPM telah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian oleh Suryaningsih et.al. (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap

kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2001 sampai 2011, dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, dan upaya pemungutan PAD sebagai indikator kinerja keuangan daerah. Anggraini (2015) meneliti pengaruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap IPM pada pemerintah provinsi di Indonesia.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap IPM. Penelitian oleh Batafor (2011) yang melakukan evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM.

Selanjutnya produktifitas dan pemerataan merupakan premis penting dalam definisi atau konsep pembangunan manusia menurut UNDP (HDR, 1995:103). Produktifitas dapat tercipta bila penduduk memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik, dan selanjutnya meningkatkan kapasitas serta berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau meningkatkan daya beli penduduk. Pemerataan dapat tercipta bila penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Akses tersebut dapat berupa sarana dan prasarana publik untuk memperlancar aktifitas ekonomi dan sosial penduduk yang pembangunannya dibiayai dari belanja modal pemerintah daerah.

Belanja modal secara umum dialokasikan untuk sarana dan prasarana publik, dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung aspek pembangunan

manusia di wilayahnya, seperti gedung/bangunan sekolah yang layak dan ketersediaan alat peraga atau laboratorium di setiap sekolah yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar-mengajar, gedung/bangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau puskesmas yang nyaman dan ketersediaan alat kesehatan (alkes) yang memadai di setiap FKTP, serta infrastruktur jalan/jembatan yang memperlancar akses transportasi dan aktifitas ekonomi suatu wilayah untuk meningkatkan paritas daya beli masyarakat baik komoditas makanan dan non makanan.

Investasi modal yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat menunjang peningkatan IPM. Penelitian mengenai belanja modal dan IPM pernah dilakukan oleh Sari dan Sari (2016) yang menemukan bukti empiris bahwa PAD dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008 s.d. 2013. Denni (2012) dalam penelitiannya tentang pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap IPM di Jawa Tengah Tahun 2006-2009 menyimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, namun pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sehingga berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM. Dengan demikian, pemerintah daerah harus melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik sesuai dengan kemampuan atau kinerja keuangan daerahnya untuk memacu atau mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Dari latar belakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruh kemandirian daerah, kinerja keuangan dengan proksi derajat desentralisasi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini merupakan dari penelitian Sari (2020). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian serta

penambahan variabel, peneliti menggunakan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018 - 2020 serta penambahan variabel kemandirian daerah dan belanja modal. Maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2018-2020”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian akan difokuskan untuk membahas Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan dan Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Periode 2018-2020.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020 ?
- 2) Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020 ?
- 3) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020 ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020
- 2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kinerja Keuangan

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020

- 3) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2018-2020

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi segala pihak diantaranya :

- 1) Bagi Bidang Akademik

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan Indeks perkembangan manusia pada suatu daerah kabupaten/kota.

- 2) Bagi Pemerintah Provinsi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan kabupaten/kota terutama pada indeks pembangunan manusia.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan dari penulisan ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, juga hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV : HASILDAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

#### **BABV : SIMPULAN DAN SARAN**

Penutup terdiri atas simpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Teori Keagenan**

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak..Teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif adalah *principal* (Halim, 2010).

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat, maka hubungan pemerintah pusat adalah sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah sebagai agen yang dapat dilihat dari tindakan pendelegasian dana perimbangan kepada daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban dari adanya pendelegasian wewenang tersebut dan dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh belanja pemerintah daerah.

Hubungan keagenan terjadi diantara pemerintah daerah sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal, selama ini masyarakat sudah memberikan sumber daya ke daerah dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain. Seharusnya mereka mendapatkan imbalan dari pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Berdasarkan kesepakatan diantara prinsipal dengan agen untuk mengelola dan mengendalikan kekayaan daerah dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan publik dalam hal pelaporan keuangan kesatuan usaha yang menjadi pertanggung jawaban kepada pemilik. Bentuk pertanggung jawaban pemerintah pusat sebagai agen dari pemerintah pusat dan masyarakat yaitu dengan menyusun laporan realisasi anggaran daerah yang berisi pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran tertentu. Sehingga bisa sesuai dengan tujuan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut BPS (2008) yaitu untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah

komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

## **2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut BPS (2008: 9), IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Sebelumnya IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu: angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Namun kemudian BPS mengubah perhitungan IPM menggunakan metode baru yang dibentuk berdasarkan empat indikator yang disempurnakan yaitu: angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan kemampuan daya beli melalui pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS, 2015). Penyempurnaan perhitungan IPM yang dibuat pada tahun 2014 oleh BPS antara lain adalah:

1. Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi 2011.
2. Mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.
3. Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.

Variabel dalam IPM Metode Baru adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (*Life Expectancy* - e0)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

2. Rata-Rata Lama Sekolah – RLS (*Mean Years of Schooling* - MYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

3. Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling* - EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru

menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao (BPS, 2015).

### **2.3. Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007).

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Menurut Halim (2007), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah.

#### **2.3.1. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sumber pendapatan asli daerah, yaitu :

### **a. Pajak Daerah**

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

### **b. Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.**

Selain dari pendapatan atas pajak dan retribusi daerah, pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari laba BUMD yang dimiliki dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu juga cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan salah satu sumber pendapatan daerah.

### **d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.**

Pendapatan bersumber dari pendapatan daerah selain Pajak daerah, Restribusi daerah, dan BUMD (Bati, 2009) mengatakan bahwa sumber lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah, yaitu hasil penjualan aset daerah tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan konsumsi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pegembalian, fasilitas sosial dan umum,

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran.

#### **2.4. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk keuangan tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Terkait dengan pentingnya kinerja, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja (Rai, 2008). Dalam lingkup perusahaan, pengukuran kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen merupakan persoalan yang lebih kompleks dan lebih sulit, karena akan menyangkut masalah efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan dan menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga (Helfert, 1982).

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Susantih (2009) menyatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah (PAD) guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat, sehingga memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis

sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan.

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, namun pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan yang bersifat komersil. Di samping itu, penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD (Halim, 2007). Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis kinerja keuangan/fiskal daerah diantaranya rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD. Pada penelitian ini menggunakan rasio derajat desentralisasi untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan daerah.

#### **2.4.1. Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

desentralisasi. Mengukur derajat otonomi fiskal berdasarkan persentasi perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah (Munir dkk., 2004).

Menurut Bisma dan Susanto (2010 : 78) menyatakan bahwa tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2002) (dalam Khomsiyah, 2012), terdapat dua alasan pemberian otonomi daerah, yaitu:

1. Intervensi pemerintah pusat telah menimbulkan masalah yaitu rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan demokrasi di daerah;
2. Otonomi merupakan jawaban untuk memasuki kehidupan baru yang membawa peraturan-peraturan baru yang bertujuan agar terciptanya pemerintah daerah yang otonom, efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan responsif secara berkesinambungan (*sustainable*).

Menurut Bahl (2008), terdapat dua manfaat desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Efisiensi ekonomis

Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan referensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi.

2. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah

Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah pusat.

## **2.5. Belanja Modal**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 2, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2, Permendagri nomor 59 tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri nomor 5 tahun 2007 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang pernyataan standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) nomor 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap, yang dimana belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal dapat di kategorikan dalam lima kategori utama (Undang-Undang nomor 19 tahun 2012) yaitu belanja modal tanah ,belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal fisik lainnya. Faktor yang mempengaruhi belanja modal terjadi peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik.Perubahan belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pemerintah Daerah, dengan demikian harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik (Darwanto, 2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Penelitian (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
1.	Sari (2020)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif menggambarkan adanya hubungan yang berlawanan. Sementara, Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

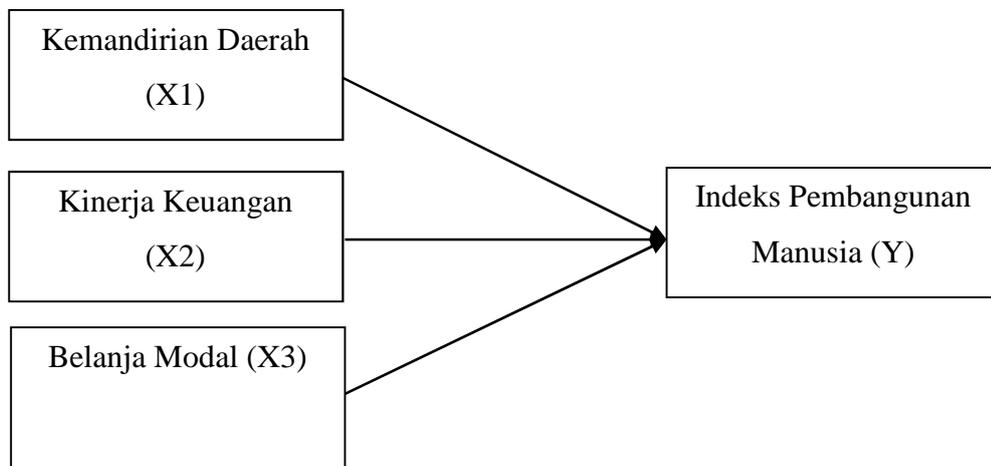
2.	Trianto (2017)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang	Variabel Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
3.	Irfan Hanif (2018)	Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)	Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pajak berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.
4.	Prakoso (2017)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung.	Variabel rasio derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap IPM sedangkan variabel ketergantungan dan kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap IPM.

5.	Fitriani (2016)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah di provinsi lampung periode 2013-2015.	Pendapatan Asli daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
----	-----------------	---	---

Sumber : Data diolah 2021.

## 2.6. Kerangka Pemikiran.

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**



Sumber : Data diolah 2021.

## **2.7. Bangunan Hipotesis**

### **2.7.1. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Penelitian Prakoso (2020) Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar keleluasaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti ketersediaan bangunan/gedung sekolah yang layak, peralatan kesehatan secara lengkap yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan harga komoditas baik makanan atau non makanan. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya. Dengan kata lain rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah. Semakin tinggi rasio tersebut maka pemerintah daerah semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik sehingga peningkatan IPM dapat tercapai (Mahmudi, 2007).

Irfan Hanif (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dewi (2014) juga mengemukakan hal yang sama dari penelitian yang dilakukan. Berlandaskan dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H1: Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.**

### **2.7.2. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan proksi rasio derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010:142). Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. Semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin leluasa pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat, yaitu peningkatan indeks harapan hidup, pendidikan, dan paritas daya beli yang ketiganya merupakan dasar pengukuran IPM. Menurut Penelitian Sari, Ferbri Nur Gita (2020) Semakin tinggi pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakintinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam pembangunan layanan publik seperti peningkatan indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang ketiganya merupakan dasar pengukuran Indeks Pembangunan manusia.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Anggraini (2015) meneliti pengaruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap IPM. Hasil penelitiannya antara lain menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM.

**H2: Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.**

### **2.7.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset

tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Penelitian Kiki (2016) Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, total penerimaan belanja modal dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi umum seperti jalan, dan jembatan, peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan berbagai bidang karena tidak semua belanja modal berefek pada publik. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Zayendra, (2016) mengatakan belanja modal memberi dampak positif pada indeks pembangunan manusia. Berlandaskan dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H3: Belanja modal berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah:

- Data pendapatan daerah berupa PAD, dana perimbangan/transfer, pinjaman daerah, data belanja modal, LRA (audited) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018-2020 kabupaten/kota yang ada di provinsi Lampung, yang diperoleh dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
- Data IPM yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS).

#### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah Triangulasi (Sugiyono, 2013). Data yang dikumpulkan melalui triangulasi yaitu dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dari Biro keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Provinsi Jawa dan website Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/>).

#### **3.3. Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

### **3.3.2. Sampel**

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method* (Sugiono, 2012). Data yang digunakan adalah laporan realisasi pendapatan daerah, laporan statistik keuangan daerah Lampung sebagai alat ukur kemandirian daerah, kinerja keuangan dengan rasio derajat desentralisasi dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2018-2020.

## **3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

### **3.4.1. Variabel Dependen**

Menurut Sugiyono (2013), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen, selanjutnya widiyanto (2013) juga menjelaskan bahwa variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel depende yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran untuk melihat kinerja wilayah dalam kualitas penduduk sebagai hal harapan hidup inteltualis dan standar hidup layak yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Formula untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{Ikesehatan \times Ipendidikan \times Ipengeluaran \times 1000}$$

Dalam harapan hidup inteltualis dan hidup layak adalah jika suatu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya peningkatan Kebijakan dan program yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Angka indeks pembangunan manusia berkisar 0-100, semakin mendekati 100 maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik (Ndakularak, 2014).

**Tabel 3.1**

**Kriteria Indeks Pembangunan Manusia**

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kriteria
$IPM \geq 80$	Sangat tinggi
$70 \leq IPM < 80$	IPM tinggi
$60 \leq IPM < 70$	IPM sedang
$IPM < 60$	IPM rendah

Sumber: indeks pembangunan manusia (<https://ipm.bps.go.id/page/ipm>)

**3.4.2. Variabel Independen**

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, disebut juga variabel yang mempengaruhi.

**3.4.2.1. Kemandirian Daerah**

Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian daerah :} \\ \frac{\text{Pendapatan Asli daerah} / \text{transfer pusat} + \text{daerah}}{100\%}$$

### **3.4.2.2. Kinerja Keuangan menggunakan proxy rasio derajat desentralisasi:**

#### **3.4.2.2.1. Rasio Derajat Desentralisasi.**

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi :} \\ \text{PAD/ Total Pendapatan Daerah x 100\%}$$

#### **3.4.2.3. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Suatu pengeluaran atau belanja dikatakan sebagai belanja modal, jika pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya penambahan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam menghitung belanja modal, yaitu:

$$\text{BM} = \text{Belanja modal tanah} + \text{belanja modal} \\ \text{peralatan dan bensin} + \text{belanja modal gedung} \\ \text{dan bangunan} + \text{belanja modal jalan, irigasi,} \\ \text{jaringan} + \text{belanja modal pengeluaran fisik}$$

### **3.5. Metode Analisis Data**

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu dengan dua sudut pendekatan yaitu deskriptif kuantitatif dan kuantitatif.

### **3.5.1. Analisis Stastistik Deskriptif**

Pada penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (sugiyono, 2013). Deskriptif kuantitatif memberikan gambaran dengan kriteria nilai mean, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum dengan tujuan yang menjelaskan karakteristik data yang digunakan dalam penelitian.

### **3.5.2. Kuantitatif**

Menurut sugiyono (2013), kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dengan penelitian sebagai berikut:

#### **3.5.2.1. Uji Asumsi Klasik**

Penelitian dengan menggunakan model regresi membutuhkan beberapa pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, gejala heteroskedastisitas dan gejala autokorelasi. Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

##### **3.5.2.1.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variable independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normal atau tidak maka dilakukan uji normalitas menurut kolmogorof smirnov satu arah dan analisis grafik smirnov menggunakan tingkat kepercayaan 5 % (Ghozali, 2013).

#### **3.5.2.1.2. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji atau melihat apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Multikolinieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas timbul akibat adanya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada diluar model. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ). Adanya multikolinieritas ditunjukkan dengan nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ .

#### **3.5.2.1.3. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi korelasi (hubungan) diantara anggota-anggota sampel penelitian yang diurutkan berdasarkan waktu sebelumnya. Menurut Ghazali (2013), Autokorelasi adalah kondisi dimana dalam sekumpulan observasi yang berurutan sepanjang waktu untuk variabel tertentu antara observasi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan uji Durbin-Watson (DW Test). Pengambilan keputusan tidak adanya autokorelasi apabila  $du < d < 4-du$  (Ghozali, 2016).

#### **3.5.2.1.4. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Apabila varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastik, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastik (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang homokedastik atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila ada kesamaan deviasi standar nilai variabel dependent pada variabel independen. Hal ini akan mengakibatkan varians koefisien regresi menjadi minimum dan confidence interval melebihi sehingga hasil uji statistik tidak valid.

### 3.6. Uji Regresi Linier Berganda

Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari adanya hubungan antara dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$IPM = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi

X1 = Kemandirian Daerah

X2 = Kinerja Keuangan

X3 = Belanja modal

E = *error*

### 3.7. Pengujian Hipotesis

#### 3.7.1. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah

nol atau satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan varian variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted R bernilai 2 negatif, maka adjusted R dianggap nol.

### **3.7.2. Uji F-test**

Menurut Ghozali (2013:98) Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 5%, distribusi F dengan derajat kebebasan ( $\alpha; K-1, n-K-1$ ).

Kriteria pengujian :

- a.  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau signifikansi  $> 0.05$ .  $H_0$  diterima, artinya variabel independen secara serentak atau bersamaan tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b.  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau signifikansi  $< 0.05$ .  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### **3.7.3. Uji t-test**

Uji Statistik Uji t-test menunjukkan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Adapun kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen pada variabel dependen, begitupun sebaliknya jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka ada pengaruh secara parsial variabel independen pada variabel Independen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian**

Objek penelitian dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2018 - 2020. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang telah ditetapkan dengan beberapa kriteria.

**Tabel 4.1 Pemilihan Sampel**

NO	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung	13
2	Kota yang ada di Provinsi Lampung	2
3	Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan	15
4	Jumlah observasi (3 tahun x 15)	45

Sumber : data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan kriteria sampel dan prosedur penyampelan pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 15 Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi Lampung dengan periode penelitian 3 tahun, sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 sampel.

## 4.2. Hasil Analisa Data

### 4.2.1. Statistic Deskriptif

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) berupa data indeks pembangunan manusia, statistik keuangan kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2018 - 2020. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan dengan Proksi Derajat Desentralisasi dan Belanja Modal. Statistik deskriptif dari variabel sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama periode 2018 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam table 4.2 berikut.

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian**

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEMANDIRIAN DAERAH	45	,04	,78	,1271	,13287
KINERJA KEUANGAN	45	,03	,38	,0832	,07106
BELANJA MODAL	45	120762727,00	611157393,00	266764224,93 33	103358015, 49956
IPM	45	62,88	77,44	68,3620	3,92670
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Output SPSS 21

Berdasarkan Tabel 4.2 nilai N menunjukkan jumlah sampel observasi yang digunakan didalam penelitian ini sebanyak 45 observasi yang diambil dari data laporan publikasi tahunan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang diterbitkan di Bursa Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dilihat

dari tabel diatas semua nilai memiliki nilai positif. Berikut perincian data deskriptif yang telah diolah.

1. Variabel Kemandirian Daerah memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 0,78 yang terletak pada Kota Bandar Lampung tahun 2020 dan 0,04 yang terletak pada Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018. Mean atau rata – rata Variabel Kemandirian Daerah sebesar 0,1279 dan Standar Deviasi sebesar 0,12875. Nilai Standar Deviasi Variabel Kemandirian Daerah lebih besar dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data Variabel Kemandirian Daerah tidak baik.
2. Variabel Kinerja Keuangan dengan Proksi Derajat Desentralisasi memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 0,38 yang terletak pada Kota Bandar Lampung tahun 2020 dan 0,03 yang terletak pada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018. Mean atau rata – rata Variabel Kinerja Keuangan dengan Proksi Derajat Desentralisasi sebesar 0,0840 dan Standar Deviasi sebesar 0,06891. Nilai Standar Deviasi lebih kecil dari nilai Mean menunjukkan bahwa variasi data Variabel Kinerja Keuangan dengan Proksi Derajat Desentralisasi baik.
3. Variabel Belanja Modal memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 6111 yang terletak pada Kota Bandar Lampung tahun 2020 dan 1207 yang terletak pada Kabupaten Lampung Utara tahun 2019. Mean atau rata – rata Variabel Belanja Modal sebesar 2667 dan Standar Deviasi sebesar 1033. Nilai Standar Deviasi lebih besar dari nilai Mean menunjukkan bahwa variasi data Variabel Belanja Modal tidak baik.

#### **4.3. Uji Asumsi Klasik**

Penelitian dengan menggunakan model regresi membutuhkan beberapa pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, gejala heteroskedastisitas dan gejala autokorelasi. Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### 4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data statistik dan analisis grafik dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2013):

- 1) Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- 2) Jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 atau 5% berarti data residual terdistribusi normal.

**Tabel 4.3 Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,62974683
	Absolute	,147
Most Extreme Differences	Positive	,086
	Negative	-,147
Kolmogorov-Smirnov Z		,989
Asymp. Sig. (2-tailed)		,282

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* pada tabel 4.3 menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* yaitu 0,282. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

#### **4.3.2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance InflationFactor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  atau *VIF tolerance*  $\leq 10 \leq 0,10$  Apabila atau nilai *VIF*  $\geq$  maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013).

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	63,280	,894			
1 KEMANDIRIAN DAERAH	-52,537	11,960	-1,778	,026	38,980
KINERJA KEUANGAN	144,585	21,633	2,617	,027	36,478
BELANJA MODAL	-1,035E-009	,000	-,027	,668	1,498

a. Dependent Variable: IPM

Pada Tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa variabel independen secara keseluruhan memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat multikolonieritas.

### 4.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t<sub>-1</sub> (Ghozali, 2013). Pengujian gejala autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, apabila  $DU < DW < (4 - DU)$  maka tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,910 <sup>a</sup>	,828	,815	1,68832	2,410

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, KINERJA KEUANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH

b. Dependent Variable: IPM

Dari hasil uji *Durbin Watson* pada tabel 4.5, diketahui nilai *Durbin Watson* (DW) adalah sebesar 2,410 dengan batas atas (DU) 1,7574. Nilai DW lebih besar dari batas atas (DU) 1,7574 dan kurang dari  $4 - 1,7574 = 2,2525$  ( $4 - DU$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

#### 4.3.4. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jika variabel independen secara statistik menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya  $> 0.05$ , maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2013).

**Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,528	,485		1,089	,283
1 KEMANDIRIAN DAERAH	-8,175	6,494	-1,182	-1,259	,215
KINERJA KEUANGAN	15,425	11,746	1,193	1,313	,196
BELANJA MODAL	2,091E-009	,000	,235	1,278	,209

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variabel kemandirian daerah, efektivitas pad dan belanja modal memiliki nilai signifikan  $> 0,05$  (0,215; 0,196; 0,209  $> 0,05$ ). Artinya 3 variabel memenuhi syarat terhindar dari heteroskedastisitas.

#### 4.3.5. Uji Regresi Linier Berganda.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficientsa					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	63,280	,894		70,799	,000
1 KEMANDIRIAN DAERAH	-52,537	11,960	-1,778	-4,393	,000
KINERJA KEUANGAN	144,585	21,633	2,617	6,684	,000
BELANJA MODAL	-1,035E-009	,000	-,027	-,343	,733

a. Dependent Variable: IPM

Ringkasan Analisa Regresi Berganda			
Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	Sig
Konstanta	63,280		
X1	-52,537	-4,393	0,000
X2	144,585	6,684	0,000
X3	-1,035	-0,343	0,733
F <sub>hitung</sub>	131,585		0
R Square	0,827		

Dari hasil tabel diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$IPM = 63,280 + -52,537X1 + 144,585X2 + -1,035X3 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka interpretasinya adalah Hasil konstanta sebesar 63,036 berarti apabila variabel kemandirian daerah, derajat desentralisasi dan belanja modal tidak ada atau sama dengan 0 maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 63,280. Koefisien variabel kemandirian daerah sebesar -52,995. Hal ini berarti apabila variabel kemandirian daerah menambah 1% maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar -52,537. Koefisien derajat desentralisasi sebesar 144,585. Hal ini berarti apabila derajat desentralisasi menambah 1% maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

akan meningkat sebesar 144,585. Koefisien variabel belanja modal sebesar -1,035. Hal ini berarti apabila variabel belanja modal menambah 1% maka variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sebesar -1,035.

#### 4.3.6. Uji Hipotesis

##### 4.3.6.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menggambarkan seberapa sejauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai *adjusted*  $R^2$  mendekati nilai satu maka variabel independen hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen. Jika *adjusted*  $R^2$  mendekati nol maka semakin lemah variabel independen menerangkan variabel dependen terbatas (Ghozali, 2013).

**Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,910 <sup>a</sup>	,828	,815	1,68832	2,410

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, KINERJA KEUANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH

b. Dependent Variable: IPM

Dari tabel diatas diketahui hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,827 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen yaitu sebesar 82,8% dan sisanya sebesar 17,4% dijelaskan oleh variabel lain.

##### 4.3.6.2. Uji F-test

Menurut Ghozali (2013:98) Uji F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat

signifikan ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 5%, distribusi F dengan derajat kebebasan ( $\alpha; K-1, n-K-1$ ).

Kriteria pengujian :

a.  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau signifikansi  $> 0.05$ .  $H_0$  diterima, artinya variabel independen secara serentak atau bersamaan tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b.  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau signifikansi  $< 0.05$ .  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

**Tabel 4.9. Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	561,568	3	187,189	65,671	,000 <sup>b</sup>
Residual	116,867	41	2,850		
Total	678,435	44			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, KINERJA KEUANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH

Dari hasil uji ANOVA atau *F test*, didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,000 atau  $< 0,05$  sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena semua variabel independen (Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan, dan Belanja Modal) berpengaruh terhadap variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### 4.3.6.2. Uji t-test

Uji Statistik t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh antar masing-masing (*parsial*) variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan pada tingkat Apabila nilai keyakinan significant  $< 95\%$  a tingkat signifikan (0,05) maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap

variabel dependennya, sebaliknya jika nilai signifikan  $t >$  tingkat signifikan (0,05) maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.

**Tabel 4.10. Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	63,280	,894		70,799	,000
1 KEMANDIRIAN DAERAH	-52,537	11,960	-1,778	-4,393	,000
KINERJA KEUANGAN	144,585	21,633	2,617	6,684	,000
BELANJA MODAL	-1,035E-009	,000	-,027	-,343	,733

a. Dependent Variable: IPM

Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan table 4.10 hasil pengujian menunjukkan variable Kemandirian Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ( $p < 0,05$ ). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kata lain H1 diterima.
2. Berdasarkan table 4.9 hasil pengujian menunjukkan Derajat Desentralisasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ( $p < 0,05$ ). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kata lain H2 diterima.
3. Berdasarkan table 4.9 hasil pengujian menunjukkan variable Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,733 yang lebih besar dari 0,05 ( $p > 0,05$ ). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kata lain H3 ditolak.

#### **4.4. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.4.1. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada hasil analisis data yang dilakukan variabel efektivitas pad berpengaruh signifikan pada IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintah dapat meningkatkan PAD dan itu akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah tersebut di harapkan mampu untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007). Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD

Seperti penelitian Hanif (2018) yang menyatakan kemandirian daerah berpengaruh pada IPM. Tidak hanya itu dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik lebih demokratis. Jika daerah tersebut tidak mampu untuk menerapkan desentralisasi fiskal yaitu berupa pelimpahan wewenang dari pusat maka daerah tersebut akan tertinggal dan menyebabkan kemunduran dalam pembangunan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah jika dalam masing-masing daerah dapat mandiri dalam

mengelola daerahnya maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

#### **4.4.2. Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada hasil analisis data yang dilakukan variabel Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan pada IPM. Hasil ini menunjukkan menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya bantuan pemerintah pusat pemerintah Provinsi Lampung memiliki sumber daya pendanaan selain PAD yang berasal dari total pendapatan daerah yang semakin tinggi, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Layanan publik yang baik dapat meningkatkan IPM.

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Prakoso (2017), yang menyatakan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, namun sejalan dengan penelitian Sari dan Supadmi (2016) yang menyatakan Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **4.4.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada hasil analisis data yang dilakukan variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan pada IPM. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara

ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pratowo (2012) dan Priambodo (2015). Peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/prasarana (misalnya pembangunan jalan, bendungan, dan lainnya), penyediaan layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai pihak. Pembangunan infrastruktur akan mempekerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak *multiple effect* ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2020. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan dengan proksi Derajat Desentralisasi dan Belanja Modal yang diuji pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini mengambil sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebanyak 15 sampel sebanyak 3 tahun berturut – turut sehingga sampel yang didapat sebesar 45 sampel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan Purposive sampling dan data diolah menggunakan program SPSS 20.0.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian variabel Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan dengan proksi Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Seperti hasil penelitian (Priambodo, 2015) menjelaskan peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/ prasarana (misalnya pembangunan jalan, bendungan, dan lainnya), penyediaan layanan umum seperti kesehatan dan

pendidikan, serta dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai pihak. Pembangunan infrastruktur akan mempekerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak *multiple effect* ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berikut ini beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya :

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini belum mengkaji variabel lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## **5.3 Saran**

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian, dimana pada penelitian ini hanya menggunakan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang rentang penelitian sehingga kecenderungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam jangka panjang dapat lebih terlihat.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti tingkat pengangguran, dana alokasi umum dan tingkat pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. Dissertasi. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Astri, Meylina. Nikensari, S.I. dan Kuncara, Harya. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis Vol 1, No.1.UNJ. Jakarta
- Badan pusat statistik (BPS), 2021. Indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan belanja modal. <http://www.bps.go.id> diakses 11 Juli 2021.
- Bahl, R. 2008. The Pillars of Fiscal Decentralization. CAF Working Papers.
- Batafor, G. G. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi NTT. Tesis. Bali. Universitas Udayana Denpasar.
- Bati, 2009. Pengaruh Belanja Modal dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Utara). Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Cahyono,Hendry. 2015. Pengaruh Nilai Tukar Petani Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya.
- Citradi, Tirta. CNBC Indonesia. 2020. *Duh, Indeks Pembangunan Manusia RI No 107 dari 189 Negara!*. Diakses 12 Juli 2021. Dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558/duh-indeks-pembangunan-manusia-ri-no-107-dari-189-negara/2>
- Darwanto dan Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal studi Kasus Kabupaten atau Kota se-Jawa Bali tahun 2004-2005.
- Denni, S.M. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal EDAJ. 1(1).
- Dewi, P.A.K dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4, No. 1.
- Eka Siwi Hidayati, 2012. Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi

Umum Terhadap Belanja Pemerintah Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Lampung.

Fitriani, Kiki. 2016. Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia pada pemerintah daerah di provinsi lampung periode 2013-2015. Universitas Bandar Lampung, Lampung.

Ghozali, Imam.,2013. Uji Asumsi Klasik. Semarang : Badan UNDIP

Ghozali,Imam., 2010. Uji Stasitik T. Semarang: Badan UNDIP

Ghozali,Imam., 2012. Analisis Dterminasi.Semarang : Badan UNDIP

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul dan syukriy Abdullah (2010). Agency Theory Pemerintah Daerah. Helfert, E. A. 1982. Techniques of Financial Analysis 5th Edition. Homewood, IL: Irwin

Hobrouw, Yustina Asnad, Suaryana I Gusti Ngurah Agung, dan Putri I G.A.M Asri Dwija (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. Universitas Udayana.

Ida Ayu Cendara, Ni Luh Supadmi, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali.

Indriantoro dan Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFY Yogyakarta. Yogyakarta

Irfan Hanif, Muhammad. 2018. Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode (2013-2017).

Kahang Merang, Saleh Muhammad, Suharto Rachmad Budi. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur. Universitas Mulawarman

Khomsiyah. 2012. Good Governance dan Pemberantasan Korupsi. Diakses dari [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id).

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbitdan Percetakan YKPN.

- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Kapasitas Pembebanan Belanja Modal dan Pengeluaran Belanja Modal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Nilai Asset Belanja Modal.
- Peraturan Peresiden Nomor 71 tahun 2010 Tentang Belanja Modal Untuk Memperoleh asset Pemerintah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 Tentang Penyelenggaraan Akuntansi Asset Tetap.
- Prakoso, I. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Se-provinsi Lampung. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Pratowo, Nur Isa. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia.
- Priambodo, Anugrah. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Putu Gede, I Gusti Ketut Agung, 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali.
- Rai, I. G. A. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Saftiana, Yulia. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. Tesis Universitas Sriwijaya.
- Sari, Ida Ayu Candra Yunita & Supadmi, Ni Luh. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3.
- Sari, Febri Nur Gita. 2020. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

- Sarkoro, Hastu & Zulfikar.2016. Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia.
- Setyowati dan Yohanankus Suparwati, 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.
- Sidiq Ariyanto, Farhan. 2018. Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar petani terhadap indeks pembangunan manusia dipulau sumatera tahun 2011-2016. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono,2013. Metode Penelitian. Bandung : Alfabeta Jenis Penelitian, Pengumpulan data dan Sumber.
- Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, Vol.1 (2):109-124.
- Suryaningsih, et. al. 2015. Dampak Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 40 (8):537-554. ISSN : 2337-3067.
- Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.
- Trianto, Anton. 2017. Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang. 2017.
- Tria Desi Putri, Toto Gunarto, Saimut, 2014, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintahan Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2013
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang kategori Belanja Modal
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Objek dan Retribusi Pajak Daerah.
- UNDP, 2004 Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia. <http://www.undp.or.id>,

diakses tanggal 25 november 2015 Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja.

UNDP. 1995. Human Development Report 1995. Oxford University Press. New York

Widyatama, A. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung).

Widiyanto, Mikha Agus. 2013. Statistik terapan.

Zayendra, 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Daerah fungsi pendidikan, kesehatan dan Belanja Modal sebagai variabel pemedediasi.

## LAMPIRAN I

### Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian

NO	Provinsi/Kabupaten/Kota
1	Provinsi Lampung
2	Lampung Barat
3	Lampung Selatan
4	Lampung TENGAH
5	Lampung Timur
6	Lampung Utara
7	Mesuji
8	Pessawaran
9	Pesisir Barat
10	Pringsewu
11	Tulang Bawang
12	Tanggamus
13	Tulang Bawang Barat
14	Way Kanan
15	Bandar Lampung
16	Metro

## LAMPIRAN II

### HASIL UJI TABULASI

#### 1. Uji Statistik Deskriptif

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEMANDIRIAN DAERAH	45	,04	,78	,1271	,13287
KINERJA KEUANGAN	45	,03	,38	,0832	,07106
BELANJA MODAL	45	120762727,00	611157393,00	266764224,93 33	103358015, 49956
IPM	45	62,88	77,44	68,3620	3,92670
Valid N (listwise)	45				

#### 2. Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,62974683
	Absolute	,147
Most Extreme Differences	Positive	,086
	Negative	-,147
Kolmogorov-Smirnov Z		,989
Asymp. Sig. (2-tailed)		,282

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### 3. Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	63,280	,894			
	KEMANDIRIAN DAERAH	-52,537	11,960	-1,778	,026	38,980
	KINERJA KEUANGAN	144,585	21,633	2,617	,027	36,478
	BELANJA MODAL	-1,035E-009	,000	-,027	,668	1,498

a. Dependent Variable: IPM

### 4. Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,910 <sup>a</sup>	,828	,815	1,68832	2,410

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, KINERJA KEUANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH

b. Dependent Variable: IPM

### 5. Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,528	,485	1,089	,283
	KEMANDIRIAN DAERAH	-8,175	6,494	-1,182	,215
	KINERJA KEUANGAN	15,425	11,746	1,193	,196

BELANJA MODAL	2,091E-009	,000	,235	1,278	,209
---------------	------------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: ABS\_RES

## 6. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	63,280	,894		70,799	,000
	KEMANDIRIAN DAERAH	-52,537	11,960	-1,778	-4,393	,000
	KINERJA KEUANGAN	144,585	21,633	2,617	6,684	,000
	BELANJA MODAL	-1,035E-009	,000	-,027	-,343	,733

a. Dependent Variable: IPM

Ringkasan Analisa Regresi Berganda			
Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	Sig
Konstanta	63,280		
X1	-52,537	-4,393	0,000
X2	144,585	6,684	0,000
X3	-1,035	-0,343	0,733
F <sub>hitung</sub>	131,585		0
R Square	0,827		

## 7. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,910 <sup>a</sup>	,828	,815	1,68832	2,410

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, KINERJA KEUANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH

b. Dependent Variable: IPM

## 8. UJI F

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	561,568	3	187,189	65,671	,000 <sup>b</sup>
	Residual	116,867	41	2,850		
	Total	678,435	44			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, KINERJA KEUANGAN, KEMANDIRIAN DAERAH

## 9. UJI T

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	63,280	,894		70,799	,000
	KEMANDIRIAN DAERAH	-52,537	11,960	-1,778	-4,393	,000
	KINERJA KEUANGAN	144,585	21,633	2,617	6,684	,000
	BELANJA MODAL	-1,035E-009	,000	-,027	-,343	,733

a. Dependent Variable: IPM